

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di seluruh negara baik itu negara maju ataupun berkembang tentunya akan menghadapi berbagai macam permasalahan dalam proses pembangunan ekonominya. Permasalahan yang sering ditemui ialah adanya ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan antar penduduk. Selama dua dekade terakhir sebagian besar negara telah mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan tersebut diperparah akibat dampak dari pandemi covid-19 yang mengancam pemulihan ekonomi untuk kembali ke pertumbuhan inklusif serta adanya mobilitas sosial yang lebih rendah dalam jangka panjang. Ketimpangan pendapatan ini dipicu oleh faktor seperti efek pengangguran yang bertahan lama dengan kapasitas masyarakat berpendidikan rendah serta hancurnya usaha mikro dan kecil (Sankof, Zheng, & Lenert, 2020). Ketimpangan pendapatan global merupakan bagian yang berfokus pada pendapatan dari berbagai individu dalam distribusi pendapatan di seluruh dunia. Menurut data ¹*Institute for Policy Studies* di Amerika Serikat misalnya, tingkat ketimpangan pendapatan satu persennya merupakan rumah tangga terkaya dengan rata-rata penghasilan lebih dari 84 kali lebih banyak dibandingkan

¹ Institute for Policy Studies: diakses: 07 april 2023, tersedia di situs : <https://inequality.org/facts/income-inequality/>

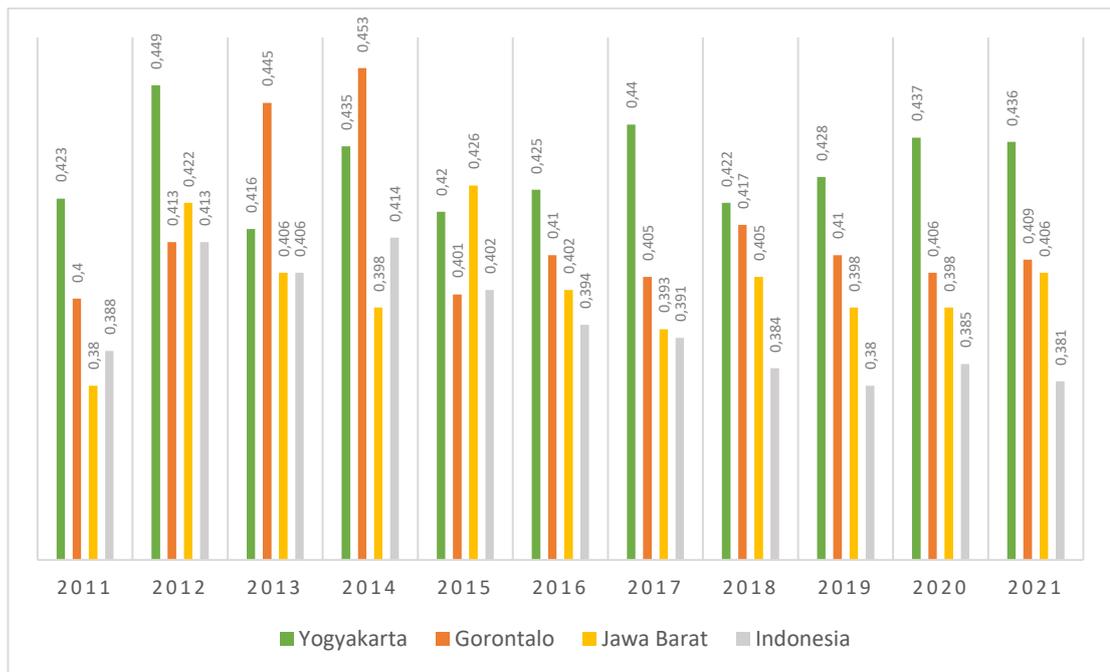
dengan rumah tangga kalangan bawah. Peningkatan pendapatan yang cepat di kalangan atas mendorong dan memperburuk ketimpangan pendapatan di dalam negeri. Berdasarkan data United Nations sebanyak 30 persen ketimpangan pendapatan dipicu oleh ketimpangan dalam rumah tangga.

Menurut (Wicaksono & Amir, 2017), *Asian Development Bank Institute* menemukan fakta bahwa ketimpangan yang semakin meningkat menyebabkan masalah serius yang dihadapi negara-negara berkembang, salah satunya yaitu indonesia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 dengan julukan sebagai negara kepulauan terbesar dengan total masyarakat 273 juta jiwa. Besarnya jumlah populasi masyarakat tersebut yang tidak diikuti dengan pemerataan populasi antar wilayah akan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang mana terjadi perbedaan pendapatan yang diperoleh antara masyarakat pada daerah maju dan tertinggal (Olliffiana & Khoirudin, 2022).

Terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah satu dengan daerah yang lain akibat dampak nyata dari tidak meratanya pembangunan ekonomi di indonesia. Daerah dengan ratio ketimpangan yang cukup tinggi menyatakan bahwa distribusi pendapatan di daerah tersebut kurang merata. Sedangkan daerah dengan ratio ketimpangan yang cukup rendah menggambarkan bahwa distribusi pendapatan di daerah tersebut tergolong sudah cukup merata (Farrah & Yuliadi, 2020)

Dalam pengukuran ketimpangan pendapatan dapat menggunakan Gini ratio, indeks theil, indeks williamson ataupun ukuran ketimpangan bank dunia. Untuk pengukutan dalam penelitian ini, kami memilih menggunakan koefisien

gini (*gini ratio*) karena sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah secara keseluruhan dan dengan berkisar antara nol hingga satu.



Sumber : BPS yang diolah (2023)

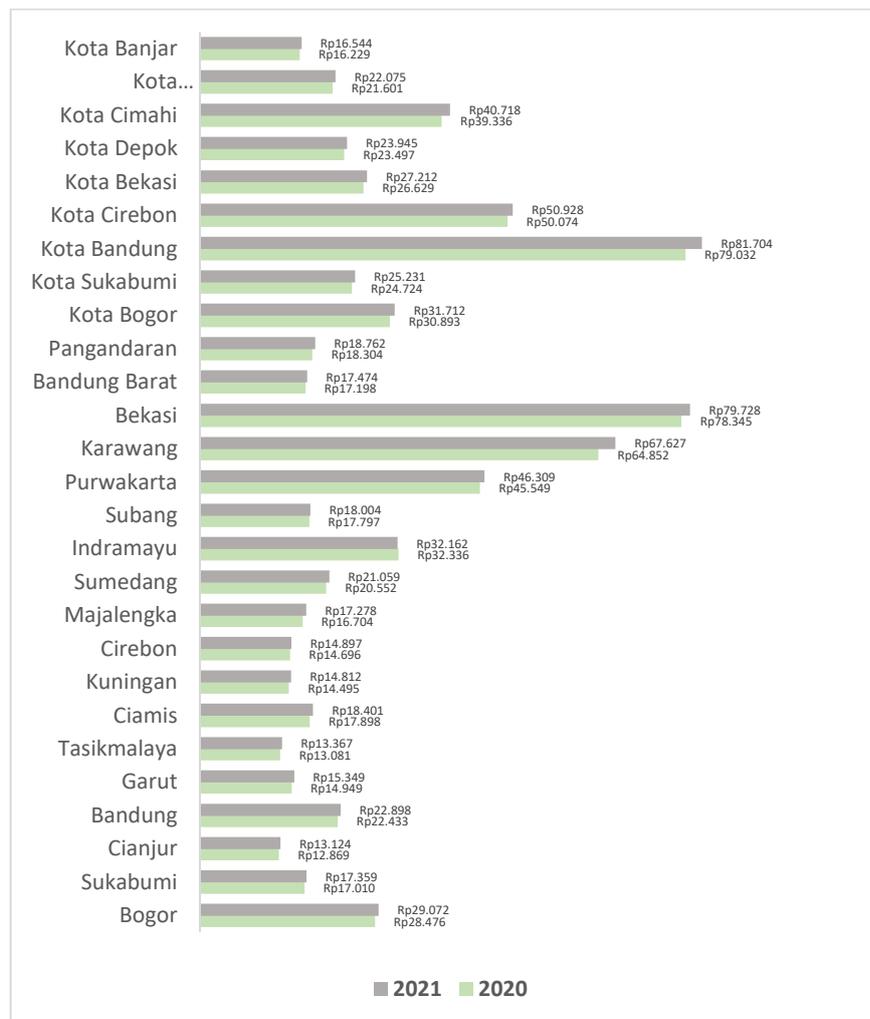
Grafik 1.1 Grafik Persentase Gini Ratio Tertinggi di Indonesia tahun 2011-2021

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat merupakan peringkat ketiga dengan tingkat ketimpangan tertinggi setelah Yogyakarta dan Gorontalo, kemudian disusul peringkat ke empat yaitu DKI Jakarta dan peringkat ke lima yaitu Papua. Berdasarkan grafik 1.1 tingkat ketimpangan pendapatan dari seluruh provinsi dari tahun 2011-2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Di tahun 2011 gini ratio sebesar 0,38 kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,422 di tahun 2012 kemudian mengalami penurunan menjadi 0,406 yakni tahun 2013, kemudian di tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 0,39. Di

tahun 2015 persentase gini ratio mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 0,426. Persentase gini ratio tahun 2016 provinsi menurun menjadi sebesar 0,402 terjadi penurunan kembali di tahun selanjutnya hingga menjadi 0,393. Dan ditahun 2018 mulai terkendali menjadi 0,405, di tahun 2019 dan 2020 tingkat gini ratio mulai menurun menjadi sebesar 0,398 tetapi di tahun 2021 gini ratio mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibanding tahun 2016 dan tahun 2018 besarnya gini ratio yaitu mencapai 0,406. Jawa Barat memiliki rata-rata gini ratio sebesar 0,403 sedangkan indonesia sendiri memiliki rata-rata 0,394. Jika dirata-rata keseluruhan dari tahun 2011 hingga 2021 Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata gini ratio yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan indonesia.

Ketimpangan pendapatan terjadi dilatarbelakangi pula oleh faktor-faktor spesifik negara seperti permasalahan ekonomi, stabilitas ekonomi serta kebijakan dalam negeri yang berpengaruh dalam tren ketimpangan suatu negara. Stabilitas ekonomi serta tingkat pertumbuhan ekonomi tergambar dari tingkat kinerja perekonomian suatu wilayah. Tingkat kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari pembangunan ekonominya. Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat digambarkan melalui indikator yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah suatu alat ukur ekonomi suatu wilayah serta dapat digunakan pula sebagai bahan pengevaluasian kegiatan pengembangan ekonomi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah ataupun pihak non-pemerintah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup keseluruhan hasil yang didapat dari segala potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia tiap daerah serta kegiatan ekonominya yang beroperasi, terlepas dari hak milik penduduk daerah tersebut ataupun bukan. Penyediaan faktor-faktor produksi memiliki keterbatasan masing-masing setiap daerah, sehingga hal tersebut menyebabkan jumlah PDRB antar wilayah berbeda-beda. Data PDRB Perkapita digunakan sebagai variabel penelitian yang berasal dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang dihasilkan pa tahun tertentu.



Sumber : BPS yang diolah (2023)

Grafik 1.2 PDRB Per kapita Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021 (Ribu Rupiah)

Berdasarkan grafik 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah PDRB Perkapita 27 kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2020 dan 2021 yang terbesar merupakan kota Bandung dengan jumlah PDRB perkapita sebesar 81704 tahun 2020 lalu PDRB perkapita 79032 tahun 2021. Tinggi nya nilai ini dipengaruhi karena kota Bandung merupakan pusat dari industri dan perdagangan di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan total PDRB per kapita terendah di Provinsi Jawa Barat adalah kabupaten Cianjur dengan jumlah PDRB perkapita tahun 2020 sebesar 13124 dan di tahun 2021 sebesar 12869. Rendahnya jumlah PDRB perkapita di kabupaten Cianjur.

Menurut data ²OCBC NISP, PDRB perkapita adalah ukuran kesejahteraan dan kemakmuran orang-orang dalam suatu daerah. PDRB per kapita yang semakin tinggi pada daerah tersebut berarti masyarakatnya tergolong makmur. Sehingga tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut akan rendah. Tetapi sebaliknya apabila jumlah PDRB perkapita suatu wilayah rendah maka akan menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut menjadi tinggi sehingga tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya pun rendah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui besarnya tingkat upah minimum kabupaten/kota. Salah satu instrumen anti kemiskinan

² OCBC NISP : publikasi : 23 Agustus 2021, tersedia di situs : <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/23/pendapatan-perkapita-adalah>

yaitu dengan upah minimum kabupaten atau kota, hal ini dipicu oleh dampak dari distribusi lapangan kerja ditingkat rumah tangga. Pemerintah provinsi dan kabupaten mengatur besarnya UMK dengan didasarkan oleh sektor lapangan kerja di wilayah tersebut sehingga upah minimum antar daerah berbeda-beda tergantung dengan tingkat kemajuan suatu daerah tersebut. Menurut teori neoklasik, upah minimum mampu menjadi penyebab dalam meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pemerintah akan membuat batas upah minimum di pasar tenaga kerja. adanya upah minimum akan mendorong perusahaan membatasi jumlah karyawan dan melakukan filterisasi sesuai dengan keahlian serta ketrampilan yang dibutuhkan dalam lapangan kerja. Sehingga hal tersebut menyebabkan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan terbatas akan menjadi pengangguran.

Tabel 1.1 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Karawang dan Kota Banjar Tahun 2016-2020

Tahun	Kabupaten/Kota	
	Karawang	Kota Banjar
2011	Rp 1,159,000	Rp 732,000
2012	Rp 1,269,227	Rp 780,000
2013	Rp 2,000,000	Rp 950,000
2014	Rp 2,447,450	Rp 1,025,000
2015	Rp 2,957,450	Rp 1,168,000
2016	Rp 3,330,505	Rp 1,327,965
2017	Rp 3,605,272	Rp 1,437,522
2018	Rp 3,919,291	Rp 1,562,730
2019	Rp 4,234,010	Rp 1,688,217
2020	Rp 4,594,324	Rp 1,831,884
2021	Rp 4,798,312	Rp 1,831,884

Sumber: PPID Jabar yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 dari 27 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat, UMK tertinggi merupakan kabupaten karawang dengan UMK mulai tahun 2011 sudah mampu mencapai Rp 1.159.000 tahun 2012 yaitu Rp1,269,227 tahun 2013 Rp2,000,000 tahun 2014 Rp2,447,450 tahun 2015 Rp2,957,450 tahun 2016 Rp 3.330.505, tahun 2017 yaitu Rp 3.605.272, tahun 2018 yaitu Rp 3.919.291, tahun 2019 sebesar Rp 4.234.010, tahun 2020 yaitu Rp 4.594.324 serta tahun 2021 mampu mencapai Rp 4.798.312. UMK dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan hingga dua ratus ribuan rupiah setiap tahunnya. Tingginya UMK di karawang didukung pula dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan data dari PPID Jawa Barat dari tahun 2011-2021 dari 27 kabupaten/kota, kota banjar memiliki UMK kurang dari dua juta rupiah. Pendapatan Upah minimum Kabupaten/kota tahun 2011 hanya mencapai Rp 732.000 tahun 2012 Rp780,000 tahun 2013 Rp950,000 tahun 2014 Rp1,025,000 tahun 2015 Rp1,168,000 Pada tahun 2016 UMK kota banjar sebesar Rp 1.327.965 dan tahun 2020 dan 2021 UMK mengalami kenaikan menjadi Rp 1.831.884. UMK kota banjar merupakan setengahnya dari UMK kabupaten karawang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terjadi ketidakmerataan upah minimum antar daerah satu dengan daerah lain.

Selain PDRB per kapita dan UMK, indeks pembangunan manusia (IPM) juga memiliki keterkaitan dengan ketimpangan pendapatan. IPM menggambarkan tentang bagaimanakah kualitas sumberdaya manusia di suatu

daerah. Tingginya IPM akan meningkatkan produktivitas yang dimiliki oleh seseorang sehingga dapat menambah pendapatan dan mendorong penurunan ketimpangan pendapatan (Suryani & Woyanti, 2021).



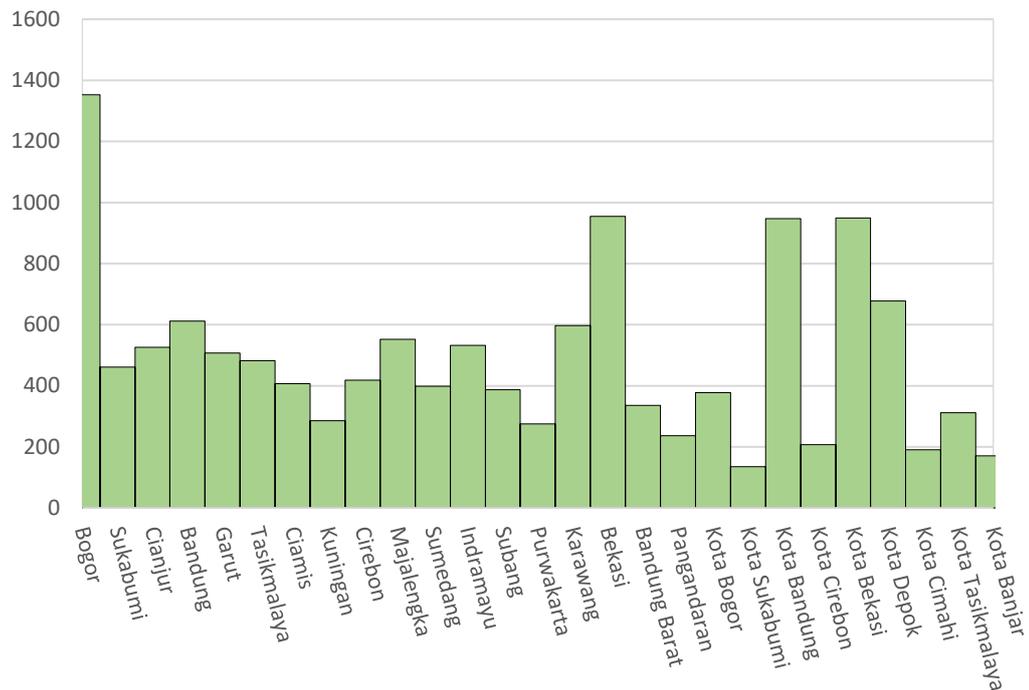
Sumber: BPS yang diolah (2023)

Grafik 1.3. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Pada grafik 1.3 sebanyak 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tingkat IPM pada tahun 2021 menunjukkan kota Bandung memiliki tingkat IPM mencapai 81.96 dan merupakan indeks tertinggi dibandingkan dengan 27 kabupaten yang lain. Menurut (Julian & Rahmi, 2022), tingginya tingkat IPM suatu daerah akan menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusianya baik sehingga mampu mendorong semakin rendahnya tingkat ketimpangan

pendapatan di daerah tersebut. Sedangkan persentase IPM dikabupaten cianjur merupakan yang paling rendah dari kabupaten/kota diProvinsi Jawa Barat dengan persentase hanya sebesar 65.56 persen.

Setiap prosedur kinerja pemerintah telah diatur prosesnya dan tujuan serta fungsinya. Salah satu instrumen belanja yang terdapat dalam APBN dan APBD digunakan oleh pemerintahan untuk membiayai seluruh kegiatannya. Belanja modal merupakan salah satu bagian dari bentuk pengalokasian belanja pemerintah. Belanja modal APBD menjadi salah satu investasi pemerintahan dalam sektor publik yang memiliki peran penting dalam jangka panjang sebagai pendorong perekonomian dan pemerataan pendapatan. Dengan adanya hasil output yang dihasilkan oleh belanja modal akan memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penghasilan sehingga akan mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan (Sutiono & Syafitri, 2018)



Sumber : BPS yang diolah (2023)

Grafik 1.4 Rata-rata Belanja Modal APBD Kab/kota di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan grafik 1.4 rata-rata belanja modal APBD tertinggi merupakan kabupaten bogor apabila di bandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Realisasi penggunaan belanja modal APBD di kabupaten bogor digunakan untuk berbagai bidang diantaranya untuk pengadaan tanah pengguna lain, bangunan bukan gedung, alat angkut darat bermotor, alat-alat bantu, pengadaan bangunan rambu-rambu, alat pemeliharaan tanaman, alat pengolahan, alat angkut darat tak bermotor, alat-alat besar darat, alat ukur, alat bengkel bermesin, alat bengkel tak bermesin, alat kantor, alat rumah tangga, pengadaan komputer, meja dan kursi kerja, alat studio, alat komunikasi, alat kedokteran, alat kesehatan, unit-unit laboratorium, alat praktek sekolah, alat keamanan dan perlindungan, pengadaan bangunan gedung tempat kerja,

pengadaan bangunan tugu peringatan, pengadaan jalan, jembatan, bangunan air irigasi, pengadaan instalasi air minum/air bersih, pengadaan instalasi air kotor, pengadaan jaringan listrik, persenjataan non senjata api, serta aset modal yang lainnya.

Selain PDRB perkapita, UMK, IPM dan belanja modal APBD. Salah satu faktor yang mendominasi tingkat ketimpangan pendapatan ialah Jumlah penduduk. Menurut BPS, Jawa Barat menempati urutan pertama dan memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan provinsi manapun di Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk akan menyebabkan penurunan pendapatan per kapita, ketidakmerataan pembangunan antar wilayah dan inflasi, hal itu terjadi apabila adanya peningkatan pendapatan moneter yang tidak diikuti secara proporsional dengan peningkatan produksi barang dan investasi sehingga dapat menyebabkan adanya tingkat ketimpangan pendapatan (Ramadhan & Sulistyono, 2021).

Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi Indonesia serta menyumbang sekitar 56,55 kontribusi PDB nasional. Tetapi pada faktanya, berdasarkan data di Indonesia malah jumlah penduduk miskin didominasi oleh 3 provinsi di Pulau Jawa. Menurut data BPS, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi kedua dengan jumlah 4.053.620 jiwa pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin yang tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah, tingkat kemiskinan yang tinggi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu telah dikaitkan beberapa variabel yang berkaitan dengan gini ratio untuk menjembatani dan mendapatkan *gap penelitian* maka diterapkan :

- a. Variabel belanja modal APBD dan jumlah penduduk miskin. Kedua variabel tersebut masih jarang digunakan oleh penelitian sebelumnya.
- b. Penelitian berfokus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, menimbang bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kabupaten dan kota.
- c. Rentang (range) gini ratio di Jawa Barat berkisar di angka 0.229 selama periode penelitian cukup tinggi dibandingkan dengan 5 provinsi dengan tingkat gini ratio tertinggi di Indonesia.
- d. Metode yang digunakan menerapkan panel first-difference GMM untuk mengatasi keterkaitan residual yang disebabkan heterogenitas pada cross-section.

Dilakukannya penelitian ini menggunakan objek kabupaten/ kota di Jawa Barat, karena Jawa Barat memperoleh urutan ketiga dari seluruh provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi setelah provinsi D.I Yogyakarta dan provinsi Gorontalo selama empat periode terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selain itu Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak yaitu berjumlah 27 kabupaten dan kota, provinsi ini diketahui bahwa merupakan provinsi dengan total populasi paling banyak di Indonesia, memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

peringkat kedua setelah provinsi Jawa Timur. Serta Provinsi Jawa Barat memiliki sebutan sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia tepatnya berada di daerah Karawang, Cikarang serta Bekasi.

Adanya penelitian ini diperlukan untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh PDRB perkapita terhadap gini ratio, pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap gini ratio, IPM terhadap gini ratio, belanja modal APBD terhadap gini ratio, jumlah penduduk terhadap gini ratio serta juga untuk mengkaji pengaruh dari jumlah penduduk miskin terhadap gini ratio kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dengan periode pada tahun 2011-2021.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar pada penjelasan latar belakang di atas, maka dapat didapatkan beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimanakah pengaruh PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021?
2. Bagaimanakah pengaruh upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021?
3. Bagaimanakah pengaruh indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021?
4. Bagaimanakah pengaruh Belanja Modal APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021?
5. Bagaimanakah pengaruh Jumlah Penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021?

6. Bagaimanakah pengaruh Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan berdasar rumusan masalah pada penelitian diatas, maka tujuan penelitian disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021
2. Untuk mengkaji pengaruh upah minimum kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021
3. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021
5. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021
6. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terhadap gini ratio tahun 2011-2021

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan sumber wawasan terkhusus bidang ekonomi untuk memahami tentang bagaimanakan determinan ketimpangan pendapatan yang ada di salah satu daerah

2. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian di dasarkan bagi pemerintah daerah yaitu mampu menjadi bahan perbandingan dengan penelitian yang lain dalam proses pengambilan keputusan dan membuat kebijakan yang tepat